

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku :

- Brotodihardjo, R Santoso. 2008. *Penghantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilyas, Wirawan B & Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kelsen, Hans. 2010. *Teori Hukum Murni*. Jakarta: Nusa Media.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 1976. *Penghantar Hukum Internasional Bagian I*. Bandung: Bina Cipta.
- Pathiana, I Wayan. 1990. *Penghantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2013. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal pendaftaran pembayaran, pelaporan, penetapan, penagihan, penyelesaian sengketa dan tindak pidana pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekamto, Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Starke, J.G. 2010. *Penghantar Hukum Internasional Edisi Ke Sepuluh*. Bandung: Sinar Grafika..
- Suharsono, Agus. 2015. *Ketentuan Umum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori & Aplikasi*. Bandung: Mitra Wacana Media.
- Suyanto, Heru & Agung S Palwono, 2011. *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Wagiman. 2016. *Terminologi Hukum Internasional*. Bandung: Sinar Grafika.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

2. Sumber Jurnal

- Benjamin Fung. *The Demand and Deed for Transparency and Disclousure in Corporete Governance*. Universal Journal of Managemen 2 Vol. 2, 2014.

- Cockfield, Arthur J. *Protecting Taxpayer Privacy Rights Under Enhanced Cross-Border Tax Information Exchange: Toward A Multilateral Taxpayer Bill of Rights*. University of British Columbia: Law Review, 2010.
- Eric J. Snyder. *FATCA and The Broader Tax Crackdown*. Trust Trustees, Vol 21 No 6 Juli, 2015.
- Henry Christensen II & Jean Marc Tirad. *The Amazing Development of Exchange of Information in Tax Matters: From Double Tax Treaties to FATCA and the CRS*. Trusts & Trustees, Vol 22 No 8, Oktober, 2018.
- Knobel, Andres & markus meinzer. *Automatic Exchange of Information; An opportunity for Developing Countries to Tackle Tax Evasion and Corruption*. Tax justice Network., 2014.
- Niel Johansen & Gabriel Zucman. 2014. *The end of Bank Secrecy? An Evaluation of The G20 Tax Heben Crackdown*. American Economic Journal: Economic Policy, Vol 6 No 1. Februari, 2014.
- R Mansyuri. *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan Administrasi Pajak*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No 1 Tahun Januari-Maret, 2000.
- Reese,P. *United States Tax Treaty Policy Toward Developing Countries: The China Example*. UCLA L. 1987.
- Saunders, IRS. *Begins Sending Individual Account Information to Foreign Countries*. The Wall Street Journals. 2015.
- Vokhid. *Developing Country Perspectives on Automatic Exchange of Tax Information..* Law, Social Justice & Global Development Journal. 2015.

3. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016.

_____ Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 28 Tahun 2007

_____ *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

_____ Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 28 Tahun 2007.

_____ Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

_____Peraturan Menteri Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri keuangan Nomor 70/PMK.03/2017.

_____Peraturan Pemerintah tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012.

4. Sumber Internet

Anandita Budi Suryana, “Intensifikasi Pajak dan Rahasia Bank”, <http://www.pajak.go.id/content/aticle/intensifikasi-pajak-dan-rahasia-bank>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 21.23 WIB

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 14:20 WIB

Hidayat Setiaji, “*saatnya otoritas pajak berdiri sendiri*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180110135643-4-1113/lepas-dari-kemenkeu-saatnya-otoritas-pajak-berdiri-sendiri>

<http://ilmupengetahuanumum.com/daftar-nama-negara-negara-di-dunia-beserta-ibukota-negara/>, Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 23.45 WIB

<http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>, “Reformasi pajak rakyat Dapat Apa”, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 00.11 WIB

<http://www.sjfpc.com/irs-offshore-voluntary-disclosure-third-program.html>, “*Limited Amnesty Program merujuk pada Offshoe Voluntary Disclosure Program (OVDP) yang pengampunannya berfokus pada pengungkapan asset di luar negeri.*” Diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 23.59 WIB

Kementerian Keuangan, APBN 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, di akses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 9:23 WIB

Kementerian keuangan, *Implementasi FACTA di Indonesia*, <https://www.kemenkeu.go.id> di akses pada tanggal 14 November 2018 pukul 13:10 WIB

Nur Arianto, “*Siapakah membangun Negeri ini tanpa pajak?*”, <http://www.pajak.go.id/content/article/siapakah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak.>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 14:43

OECD, “*Multilateral Competent Authority Agreement*”, <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.htm>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19:04 WIB

www.beritamometer.com/indonesia-siap-berlakukan-fatca-di-2018/ berita tanggal 26 Agustus 2015, diakses tanggal 18 Desember 2018 pukul 21.51 WIB

